

Jokowi Perintahkan Menteri Syahrul Perbaiki Mekanisme Penyaluran Pupuk Subsidi, Harus Selesai dalam Tiga Bulan

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi perintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memperbaiki data dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Jokowi meminta Menteri Syahrul menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Penyempurnaan, bapak Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai dan minimal yang berhak mendapatkan pupuk harus (menerima). Tidak ada pupuk yang keluar dan konteks perencanaan, menyeleweng dari SOP atau tempatnya, kata Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023..Presiden Jokowi, kata Syahrul, meminta agar program dan konsep penyaluran pupuk subsidi dibenahi sehingga terimplementasi secara tepat di lapangan, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat lahan. Syahrul mengakui anggaran yang tersedia baru mencukupi untuk mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 8-9 juta ton. Karena itu, mekanisme penyaluran pupuk subsidi harus efektif dan dipastikan tepat sasaran. Sedangkan, kebutuhan pupuk subsidi secara nasional, dikatakan Syahrul, melebihi 20 juta ton. Memang kebutuhan pupuk kita sangat besar. Kalau dalam rencana RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu bapak Presiden memerintahkan pada kami tidak boleh pupuk kurang, kata Syahrul. Yang harus dibenahi program dan konsepsinya harus menggigit dan tidak di awang-awang terlaksana sampai di lapangan, sampai petani sesuai waktu dan ketepatan yang ada, ucap Syahrul menambahkan. Syahrul mengatakan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PHCI), serta pemerintah daerah. "Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4. Koordinasi ini harus lebih matang dan kita berharap agenda ini tidak begitu lama," ujar Syahrul. Kementan, kata Syahrul, juga akan melakukan validasi untuk penerima alokasi pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton. Sistem aplikasi dan platform tiga bulan ini harus selesai sehingga ini bisa di-stressing, dicari orangnya, di mana tempatnya, kapan dipakai dan pupuknya apa, kata

Mentan. Presiden Jokowi sebelumnya mengakui sebagian besar petani yang ia temui mengeluhkan ketersediaan pupuk, terutama pupuk subsidi, untuk menunjang produksi tanaman. Jokowi menjelaskan masalah mengenai distribusi dan ketersediaan pupuk bukan hanya dialami oleh Indonesia, namun juga seluruh negara di dunia. Hal itu karena kondisi dua negara pemasok pupuk, yakni Rusia dan Ukraina belum kondusif akibat perang. "Tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," kata Jokowi di Kebumen, Jawa Tengah, pada 9 Maret 2023.

Pilihan Editor: PT KAI Buka Banyak Lowongan Kerja untuk Tingkat Pendidikan D3 hingga S2, Cek Persyaratannya [ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini](#).